



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD UMAR
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 983852

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 730 m2/730 m2 di TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.530.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 19.530.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000

Sub Total Rp. 2.658.530.000

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.648.530.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

- Nama : BADRI TAMAM
- Jabatan : ANGGOTA
- NHK : 972016

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | --- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 25.000.000 |
| 1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | --- |
| D. SURAT BERTHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 45.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 70.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | --- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 70.000.000 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI IRAWAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 983730

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 553.796.562

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/65 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 553.796.562

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 143.300.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SPORTY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.300.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS ISS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.170.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 956.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 703.222.562

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 703.222.562

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHANDY AKBAR KELANA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 983850

II. DATA HARTA

| | | |
|---|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 400.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 381 m2/65 m2 di TANGERANG, WARISAN Rp. 400.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 300.000.000 |
| 1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA 1.0 M MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 | | |
| 3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 4.300.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 100.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 804.300.000 |
| III. HUTANG | Rp. | --- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 804.300.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.